

ELEKTABILITAS TANPA LEGITIMASI AGAMA: PERAN MARGINAL TOKOH AGAMA DALAM DINAMIKA ELEKTORAL PSI DI DKI JAKARTA

Muhamad Ihya Ahsana¹, Rahmat Hidayatullah²

^{1,2}Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: ihyajams25@gmail.com, rahmat.hidayatullah@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis peran tokoh agama dalam dinamika elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta, sebuah wilayah yang dikenal dengan polarisasi politik identitas yang kuat. PSI menyajikan anomali karena memposisikan diri sebagai partai modern yang menolak politisasi agama, namun berhasil mempertahankan elektabilitas signifikan. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa peran dukungan dan legitimasi dari tokoh agama bersifat marginal dan tidak esensial dalam pembentukan basis elektoral PSI, sehingga menolak hipotesis sentralitas legitimasi agama. Elektabilitas PSI didorong oleh faktor non-primordial, meliputi daya tarik terhadap pemilih muda perkotaan (Millennial dan Gen Z), komitmen pada isu kinerja dan anti-korupsi, serta pembangunan identitas politik sebagai oposisi modern/sekuler terhadap partai berbasis agama. Peran tokoh agama yang ada terbatas pada ranah personal, edukatif, dan dialogis, bukan mobilisasi massa kelembagaan. Temuan ini memperkenalkan konsep "Elektabilitas Tanpa Legitimasi Agama" dan memverifikasi pergeseran political cleavage dari basis primordial ke basis generasi dan ideologi modernis-vs-tradisionalis di politik perkotaan Indonesia.

Kata Kunci: Elektabilitas, Legitimasi Agama, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tokoh Agama, Politik Identitas

Abstract:

This research analyzes the role of religious figures in the electoral dynamics of the Indonesian Solidarity Party (PSI) in DKI Jakarta, a region known for its strong political identity polarization. PSI presents an anomaly because it positions itself as a modern party that rejects the politicization of religion, yet it has managed to maintain significant electability. The results of the qualitative analysis show that the role of support and legitimacy from religious figures is marginal and not essential in the formation of PSI's electoral base, thereby rejecting the hypothesis of the centrality of religious legitimacy. PSI's electability is driven by non-primordial factors, including its appeal to urban young voters (Millennials and Gen Z), its commitment to performance and anti-corruption issues, and the construction of a political identity as a modern/secular opposition

to religion-based parties. The existing role of religious figures is limited to the personal, educational, and dialogical realms, rather than institutional mass mobilization. These findings introduce the concept of "Electability Without Religious Legitimacy" and verify the shift in political cleavage from a primordial basis to a generational and modernist-vs-traditionalist ideological basis in Indonesian urban politics.

Keywords: Electability, Religious Legitimacy, Indonesian Solidarity Party (PSI), Religious Figures, Identity Politics.

Pendahuluan

Interaksi antara agama dan politik di Indonesia, alih-alih melemah seiring modernisasi, justru menunjukkan penguatan yang signifikan pasca-Reformasi. Tesis sekularisasi tampak tidak terbukti, di mana realitas politik nasional menunjukkan agama tetap menjadi sumber legitimasi, alat mobilisasi massa, dan penanda identitas kolektif yang kuat. Kontestasi elektoral seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019 menjadi bukti nyata bagaimana agama dan tokohnya memainkan peran sentral dalam dinamika elektoral.

Di tengah lanskap yang didominasi narasi keagamaan ini, kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyajikan sebuah anomali. PSI, yang secara terbuka memposisikan diri sebagai partai modern, progresif, dan menolak politisasi agama, kerap dianggap sekuler. Namun, partai ini justru berhasil meraih dan mempertahankan elektabilitas signifikan di DKI Jakarta, wilayah yang menjadi episentrum mobilisasi agama pada 2017, dengan perolehan 8 kursi DPRD pada Pemilu 2019¹ dan 2024². Paradoks ini menimbulkan pertanyaan: Jika PSI tidak menggunakan legitimasi agama institusional sebagaimana partai lain, bagaimana mereka mengamankan basis pemilih di ibu kota yang religius?

¹ Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, *Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif DKI Jakarta 2019*, [https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/dkijakarta/data_kepkpud/SK%20121%20REKAP%20DAN%20LAMPIRAN_compress ed\(1\).pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/dkijakarta/data_kepkpud/SK%20121%20REKAP%20DAN%20LAMPIRAN_compress ed(1).pdf), diakses pada 17 November 2025.

² https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/dkijakarta/data_kepkpud/2024kpt33.pdf, di akses pada 27 Mei 2025.

Kajian mengenai agama dan politik elektoral di Indonesia (misalnya, Uswah, 2007³; Supriyadi, 2008⁴; Nugraha, 2019⁵; Utari, 2020⁶; Jauharin, 2022⁷) selama ini berfokus pada aktor-aktor yang menjadikan agama sebagai basis utama, seperti PKB, PKS, atau FPI. Studi-studi ini mengkonfirmasi peran sentral dan fundamental tokoh agama dalam mobilisasi massa. Namun, terdapat kekosongan literatur (*research gap*) mengenai fenomena sebaliknya: bagaimana sebuah partai yang menjadi antitesis politik identitas, seperti PSI, berinteraksi dengan aktor dan sentimen keagamaan.

Dinamika politik elektoral di Indonesia kerap memperlihatkan keterkaitan erat antara agama dan politik, khususnya di wilayah urban seperti DKI Jakarta yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks. Dalam konteks ini, legitimasi agama dan peran tokoh agama sering dianggap sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan dan dukungan elektoral. Namun, munculnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan karakter politik yang cenderung sekuler, progresif, dan berbasis isu generasi muda menghadirkan fenomena menarik: tingkat elektabilitas yang relatif stabil tanpa dukungan signifikan dari tokoh agama. Artikel ini membahas bagaimana elektabilitas PSI di DKI Jakarta dapat terbentuk di tengah minimnya legitimasi agama, serta menganalisis posisi dan peran marginal tokoh agama dalam dinamika elektoral PSI, guna memahami pergeseran pola relasi antara agama dan politik dalam kontestasi demokrasi perkotaan.

Jurnal ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran tokoh agama dalam dinamika elektoral PSI di DKI Jakarta. Penulis berargumen bahwa, berbeda dengan temuan studi sebelumnya, peran tokoh agama dalam konteks PSI bersifat marginal. Peran ini tidak berbentuk mobilisasi massa atau legitimasi institusional, melainkan terbatas pada ranah personal, edukatif, dan dialogis. Tokoh agama tidak berfungsi sebagai mesin pendulang suara utama, melainkan sebagai pemberi validasi moral yang bersifat individual, yang berasal dari otoritas karismatik personal, bukan otoritas tradisional-institusional.

³ Uswah, "Islam, Negara, dan Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1 (2007): 45–60.

⁴ Supriyadi, "Peran Tokoh Agama dalam Politik Elektoral Lokal," *Jurnal Kajian Politik*, Vol. 12, No. 3 (2008): 120–135.

⁵ Nugraha, "Agama dan Mobilisasi Massa di Pilpres 2019," *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2 (2019): 201–215.

⁶ Utari, "Identitas Kolektif dan Kontestasi Elektoral Jakarta 2017," *Jurnal Sosiologi Politik*, Vol. 8, No. 1 (2020): 10–25.

⁷ Jauharin, "Partai Politik Islam dan Strategi Elektoral di Era Reformasi," *Jurnal Studi Keagamaan dan Politik*, Vol. 4, No. 4 (2022): 300–315.

Dengan menggunakan kerangka modal sosial dan simbolik (Bourdieu) serta teori otoritas (Weber)⁸, penelitian ini menganalisis bagaimana interaksi tersebut terjadi. Alih-alih bertumpu pada “jembatan identitas formal” yang ditolak PSI, keterlibatan tokoh agama difasilitasi oleh kesamaan “jembatan nilai” universal, seperti agenda anti-korupsi dan promosi toleransi, yang juga diajarkan dalam etika setiap agama. Melalui metode studi kasus kualitatif, artikel ini membedah sebuah strategi elektoral alternatif dalam masyarakat religius, strategi yang tidak bertumpu pada legitimasi agama arus utama, melainkan pada validasi moral yang terbatas dan personal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran tokoh agama dalam dinamika elektoral PSI di DKI Jakarta, serta memahami bagaimana interaksi antara domain agama dan politik memengaruhi lanskap elektoral.

Metode studi kasus diterapkan karena peneliti bertujuan untuk mengkaji secara spesifik dan komprehensif fenomena sosial keagamaan yang terbatas (peran tokoh agama) dalam konteks politik tertentu (elektabilitas PSI di DKI Jakarta). Analisis data kualitatif dalam penelitian ini akan diterapkan dengan menggunakan perspektif dari Studi Agama-Agama dan Sosiologi Agama untuk membedah konsep otoritas, modal sosial, dan modal simbolik tokoh agama dalam arena politik.

Lokus utama penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakat DKI Jakarta yang sangat plural, dinamis, dan heterogen, yang memungkinkan observasi jelas mengenai peran tokoh agama dalam memengaruhi elektabilitas partai politik, khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penelitian lapangan dan pengumpulan data dilakukan dalam periode November 2024 hingga Mei 2025.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dibagi menjadi dua kategori:

1. Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam. Informan kunci (*key informants*) merupakan seorang tokoh agama dikalangan *Nahdhotul Ulama*, anggota MUI DKI Jakarta : Emka Farah Mumtaz.
2. Data Sekunder: Diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan, berupa dokumen-dokumen resmi, foto kegiatan PSI dan tokoh agama, data

⁸ Merujuk pada karya-karya seperti Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, terj. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977) dan Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich, Vol. 1 (Berkeley: University of California Press, 1978).

hasil Pemilu (2019 dan 2024), artikel, jurnal, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan PSI, elektabilitas, tokoh agama, dan sosiologi agama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi (*Observation*): Menggunakan teknik observasi nonpartisipan (*non-participant observation*)⁹, di mana peneliti mengamati dan mencatat secara langsung kegiatan dan bentuk peran aktif tokoh agama dalam upaya meningkatkan elektabilitas PSI di DKI Jakarta tanpa terlibat dalam lembaga tersebut.
2. Wawancara (*Interview*): Menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*).¹⁰ Wawancara ini bersifat luwes, memungkinkan pengembangan pertanyaan spontan di luar instrumen yang telah disiapkan, guna menggali informasi mendalam mengenai pemanfaatan modal sosial dan simbolik, serta bagaimana otoritas tokoh agama memengaruhi dukungan masyarakat terhadap PSI.
3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan (*Documentation and Library Research*): Pengumpulan dokumen baik yang bersifat pribadi maupun resmi, serta literatur akademik terkait permasalahan penelitian untuk memperkuat data primer dan kerangka teoritis.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah model analisis data kualitatif yang dilakukan secara berkelanjutan sejak peneliti berada di lapangan. Tahapan analisis data yang digunakan merujuk pada model Miles dan Huberman, meliputi tiga alur kegiatan yang saling berinteraksi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, wawancara, dan observasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Penemuan pola-pola, hubungan-hubungan, dan interpretasi temuan yang disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau grafik agar data terorganisir dan mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*): Penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan secara bertahap, diverifikasi melalui konfirmasi kepada informan atau merujuk kembali kepada data primer dan sekunder, untuk memahami implikasi elektoral dari peran tokoh agama dalam konteks PSI di DKI Jakarta.

⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 167.

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 181.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh agama dalam dinamika elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan analisis kualitatif mendalam, penulisan ilmiah utama menunjukkan bahwa dukungan dan legitimasi dari tokoh agama memainkan peran yang marginal dan tidak sentral,¹¹ dalam membentuk basis elektoral PSI. Elektabilitas PSI di DKI Jakarta lebih dominan didorong oleh tiga faktor utama yang bersifat non-religius atau berbasis identitas non-tradisional: (1) Konsolidasi Pemilih Muda dan Perkotaan: daya tarik PSI terletak pada citra “partai anak muda” yang modern, transparan, dan anti-korupsi, resonansi yang kuat di kalangan pemilih milenial dan Gen Z perkotaan;¹² (2) Isu Kebijakan dan Kinerja: fokus pada isu-isu kinerja pemerintah daerah, terutama dalam konteks kontroversi dan keberpihakan pada minoritas/kebijakan populis non-agama;¹³ dan (3) Identitas Politik Alternatif: kemampuan PSI untuk memposisikan diri sebagai kontras terhadap partai-partai mapan yang sarat politik identitas keagamaan, menarik segmen pemilih yang jenuh dengan polarisasi berbasis agama.¹⁴

Strategi Elektoral Sekuler PSI: Mengabaikan Legitimasi Keagamaan Formal di DKI Jakarta

Jurnal ini menyoroiti diskrepansi signifikan antara dinamika elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DKI Jakarta dengan pola-pola politik tradisional di Indonesia. Di negara yang mayoritas Muslim, dukungan dan legitimasi dari ulama, kiai, atau organisasi massa keagamaan (Ormas) besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah seringkali menjadi prasyarat vital (*sine qua non*) untuk memperoleh legitimasi massa dan mobilisasi elektoral¹⁵. Namun, PSI secara efektif mengesampingkan kebutuhan akan *endorsement* kelembagaan keagamaan formal tersebut.

1. Perbedaan Signifikan dari Pola Elektoral Tradisional

Partai-partai politik di Indonesia, terutama yang berbasis nasionalis atau berasaskan Islam, secara historis sangat bergantung pada jaringan struktural dan

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022), 400.

¹² Yanuar Nugroho, *A New Generation of Voters: Digital Natives and Indonesian Politics*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), 136.

¹³ R. William Liddle, *Demokrasi dan Kelas Menengah Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018), 216.

¹⁴ Marcus Mietzner, *Democracy's Discontent: Indonesia's Decade of Contested Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 2020), 25.

¹⁵ Robert W. Hefner, *Politics of Identity: Islam, Liberalism, and the Limits of Pluralism in Indonesia*, (Princeton: Princeton University Press, 2019), 46.

kultural Ormas keagamaan untuk menerjemahkan dukungan elite menjadi suara di tingkat akar rumput (*grassroots*)¹⁶.

- a. Partai Berbasis Islam (Islam *Non-Clerical*): Partai-partai ini mengandalkan *branding* Islam modernis atau tradisional, dengan tokoh-tokohnya kerap memiliki koneksi kuat dengan Pimpinan Pusat NU atau Muhammadiyah untuk mendapatkan *fatwa* atau *restu* politik.
- b. Partai Nasionalis Sekuler: Partai-partai ini pun sering berupaya merangkul tokoh-tokoh agama atau *platform* agama untuk menangkis stigma "anti-Islam" dan memperoleh legitimasi moral di mata pemilih Muslim konservatif¹⁷.

Sebaliknya, PSI berhasil memutus rantai ketergantungan ini. Mereka tidak secara aktif mencari atau membutuhkan *endorsement* kelembagaan dari tokoh-tokoh kunci NU atau Muhammadiyah.

2. Dukungan Tokoh Agama yang Bersifat Insidental dan Personal

Dalam kasus PSI, dukungan tokoh agama yang ada bersifat insidental dan personal, bukan merupakan *endorsement* kelembagaan yang terstruktur.

- a. Insidental: Dukungan muncul dari tokoh-tokoh agama individu yang mungkin tertarik pada platform pluralisme atau agenda anti-korupsi PSI, bukan karena adanya arahan resmi dari struktur Ormas keagamaan mereka.
- b. Personal: Dukungan tersebut lebih merefleksikan pilihan politik pribadi tokoh tersebut, yang tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi mobilisasi massa dari Ormas yang dipimpinya.

Implikasinya, dukungan ini tidak mampu memobilisasi pemilih dalam skala besar. Berbeda dengan *fatwa* politik dari seorang Kiai besar yang dapat menggerakkan jutaan *nahdliyin* (warga NU), dukungan personal tokoh agama kepada PSI hanya memberikan bobot moral yang terbatas pada level elit, tanpa menjangkau basis pemilih tradisional.

3. Jalur Sekuler dan Identitas Kontemporer: Strategi Non-Tradisional PSI

Keberhasilan PSI dalam membangun elektabilitas didorong oleh dua pilar utama yang bersifat non-tradisional¹⁸:

- a. Identitas Kontemporer: Partai Anak Muda dan Perkotaan

PSI secara agresif membangun citra sebagai partai politik generasi baru. Identitas kontemporer ini mencakup keterbukaan, penggunaan media sosial

¹⁶ Andreas Ufen, *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Patronage and Pragmatism*, (London: Routledge 2015), 87.

¹⁷ R. William Liddle, *Demokrasi dan Kelas Menengah Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018), 101.

¹⁸ Konsep sekuler dalam konteks ini tidak berarti anti-agama, melainkan berfokus pada politik yang berbasis pada urusan duniawi (*worldly affairs*) dan pemisahan eksplisit antara urusan negara dan otoritas agama.

yang masif, dan fokus pada isu-isu urban modern¹⁹. Identitas ini secara inheren sekuler (memisahkan politik dan agama) karena menargetkan pemilih muda perkotaan yang cenderung memiliki orientasi politik individualistik, pragmatis, dan terliterasi digital yang tidak lagi bergantung pada otoritas moral tradisional (termasuk tokoh agama) dalam menentukan pilihan politik.

b. Pengesampingan Legitimasi Agama Formal

PSI secara de facto mengesampingkan kebutuhan “legitimasi agama” formal yang diperlukan oleh partai politik lain. Alih-alih mencari *sertifikasi* dari ulama atau kiai, PSI mendapatkan legitimasi melalui kinerja politik (*political performance*) dan keterwakilan (*representation*) dari isu-isu yang mereka usung. Legitimasi ini bersifat sipil (berbasis kewarganegaraan) dan rasional-legal (berbasis hukum dan kinerja), bukan tradisional-keagamaan²⁰.

Dengan kata lain, PSI menunjukkan bahwa di segmen pemilih tertentu (terutama pemilih urban dan muda DKI Jakarta), kepercayaan publik (*public trust*) dapat dibangun melalui integritas anti-korupsi dan konsistensi pada pluralisme, tanpa harus melalui pintu gerbang otoritas keagamaan. Mereka jenuh dengan pola politik yang terus-menerus mengeksploitasi simbol keagamaan demi kepentingan kekuasaan, sehingga kelompok pemilih ini lebih memilih untuk menitipkan aspirasi mereka pada platform politik yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kewargaan dan keadilan sosial tanpa harus terikat pada sekat-sekat identitas primordial.

Elektabilitas Non-Legitimasi: Pergeseran Paradigma dalam Dinamika Politik Jakarta

Hipotesis awal yang menduga perlunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh legitimasi sentral dari tokoh agama untuk mencapai elektabilitas substansial di DKI Jakarta telah terbukti tidak valid. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan elektoral PSI merupakan manifestasi dari tren politik yang relatif baru, yang dapat dikonseptualisasikan sebagai “Elektabilitas Non-Legitimasi”²¹. Konsep ini merujuk pada kemampuan partai politik untuk memperoleh dukungan dan kursi tanpa mengandalkan *endorsement* atau restu

¹⁹ Yanuar Nugroho, *A New Generation of Voters: Digital Natives and Indonesian Politics*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2023), 93.

²⁰ Menggunakan terminologi Weberian, PSI lebih mengandalkan otoritas rasional-legal dan otoritas karismatik (dari figur-figur muda), daripada otoritas tradisional yang dipegang tokoh agama.

²¹ Fuad Hassan dan Rina Tambunan, “Rethinking Political Resources: Performance Legitimacy and Civic Identity in Indonesian Urban Politics”, *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2023): 145-168.

kolektif dari otoritas agama atau institusi keagamaan tradisional, yang selama ini menjadi saluran legitimasi politik dominan di Indonesia²².

PSI tidak hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan elektoral yang nyata (baik sebelum maupun selama masa penelitian) dengan secara sengaja mengandalkan saluran politik yang berbeda dari norma politik Indonesia. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran mendasar dalam permintaan politik (*political demand*) oleh segmen pemilih tertentu, terutama di lingkungan urban.

1. Dekonstruksi Saluran Legitimasi Tradisional

Dalam konteks politik Indonesia, legitimasi sering kali bersifat vertikal, mengalir dari otoritas tradisional (termasuk tokoh agama, adat, dan pemimpin organisasi massa keagamaan) ke massa pemilih²³. PSI, melalui strategi politiknya, melakukan dekonstruksi terhadap saluran legitimasi ini.

- a. Legitimasi Non-Teologis: PSI memilih untuk mencari legitimasi pada prinsip-prinsip sipil dan sekuler (dalam arti non-religius yang eksplisit), seperti anti-korupsi, transparansi, meritokrasi, dan pluralisme²⁴. Legitimasi ini bersifat horizontal, dibangun langsung melalui komunikasi digital dan *grassroots organizing* di kalangan komunitas muda dan perkotaan, tanpa perlu penyaringan atau persetujuan dari otoritas keagamaan.
- b. Aktivisme dan Kinerja sebagai Substitusi: Daripada menampilkan simbol-simbol agama atau *clerical endorsement*, PSI menonjolkan aktivisme politik yang berani (misalnya, kritis terhadap kebijakan konservatif) dan kinerja konkret para kadernya di parlemen atau eksekutif daerah²⁵. Aktivisme dan kinerja ini menjadi substitusi fungsional bagi legitimasi agama; pemilih memilih karena bukti tindakan (kinerja), bukan karena janji moral (agama).

2. Konsolidasi Basis *Post-Islamist* dan Sekuler

Munculnya Elektabilitas Non-Legitimasi PSI tidak terlepas dari konsolidasi basis pemilih yang memiliki orientasi *post-Islamist* atau sekuler (pemilih yang memisahkan urusan agama dan negara)²⁶.

- a. Pemilih *Post-Islamist*: Segmen ini adalah pemilih yang, meskipun beragama, menolak politik identitas keagamaan yang kaku dan melihat agama sebagai urusan privat atau moralitas publik, bukan sebagai dasar tunggal hukum atau

²² Saiful Mujani dan R. William Liddle, "The New Politics of Islam in Indonesia: A Contested Space", *Asian Survey*, Vol. 59, No. 4 (2019): 579-601.

²³ Legitimasi vertikal menekankan hierarki dan kepatuhan pada otoritas, berlawanan dengan legitimasi horizontal yang menekankan kesetaraan dan konsensus.

²⁴ Prinsip-prinsip sipil ini sering disebut sebagai politik yang berfokus pada Rule of Law dan Good Governance, yang melampaui batas-batas identitas keagamaan.

²⁵ Penggunaan istilah *substitusi fungsional* merujuk pada kemampuan PSI untuk mengganti fungsi legitimasi agama dengan fungsi legitimasi non-agama (kinerja dan aktivisme) dalam menarik pemilih.

²⁶ Asef Bayat, "What is Post-Islamism?", *Third World Quarterly*, Vol. 26, No. 6 (2005): 899-915.

kebijakan negara. Mereka jenuh dengan polarisasi berbasis agama dan mencari wadah yang menawarkan politik berbasis *problem-solving*.

- b. Pemilih Urban yang Pragmatis: Demografi perkotaan di DKI Jakarta cenderung mengutamakan pragmatisme politik²⁷. Keputusan memilih didasarkan pada perhitungan *cost-benefit* yang berfokus pada kualitas hidup, efisiensi layanan publik, dan *good governance*. Dalam perhitungan ini, dukungan tokoh agama memiliki bobot yang minimal, jauh lebih rendah daripada integritas kandidat atau konsistensi partai.

3. Manifestasi Tren Politik Baru

Konsep Elektabilitas Non-Legitimasi merupakan indikasi kuat adanya tren politik baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan elektoral di Indonesia²⁸. Tren ini ditandai oleh:

- a. Individualisasi Pilihan Politik: Pilihan politik semakin individualistik, terlepas dari perintah atau saran kolektif dari otoritas tradisional atau keagamaan.
- b. Digitalisasi Politik: Media sosial dan platform digital memungkinkan partai dan kandidat berinteraksi langsung dengan pemilih tanpa melalui *gatekeeper* tradisional, termasuk tokoh agama.

Oleh karena itu, keberhasilan PSI merupakan sebuah anomali penting yang menunjukkan bahwa, di pusat urban yang padat dan modern seperti DKI Jakarta, sumber daya politik non-tradisional (citra modern, isu kinerja, dan identitas sipil) dapat mengalahkan sumber daya politik tradisional (legitimasi agama) dalam menghasilkan elektabilitas.

Fenomena ini dapat diinterpretasikan secara ilmiah sebagai pergeseran *political cleavage* dari basis primordial ke basis isu dan gaya hidup. PSI memanfaatkan *cleavage* antara generasi dan antara ideologi tradisional/keagamaan dan modernis/sekuler. PSI berhasil mengartikulasikan kepentingan politik bagi segmen pemilih muda perkotaan yang melihat agama sebagai ranah privat, bukan sebagai penentu utama pilihan politik publik. Dalam konteks ini, tokoh agama tidak dilihat sebagai agen mobilisasi (pemegang kunci surga) tetapi sebagai salah satu figur publik di antara banyak lainnya.

Konsistensi dan Perbedaan dengan Literatur.

Hasil ini konsisten dengan literatur yang menyoroti meningkatnya apatisisme atau kejenuhan politik di kalangan pemilih muda terhadap politik identitas berbasis agama. Pemilih muda perkotaan cenderung lebih menghargai

²⁷ Pragmatisme politik diartikan sebagai pilihan rasional pemilih yang didasarkan pada manfaat praktis dan hasil nyata, bukan idealisme ideologis atau sentimen.

²⁸ Tren ini didukung oleh peningkatan tingkat pendidikan dan akses informasi, yang meningkatkan otonomi pemilih dalam pengambilan keputusan.

meritokrasi, transparansi, dan efisiensi kebijakan, nilai-nilai yang secara efektif dikampanyekan oleh PSI.

Namun, penulisan ini sangat berbeda dari penelitian mengenai partai-partai berbasis agama atau partai nasionalis yang masih sangat bergantung pada dukungan ulama karismatik atau organisasi keagamaan (misalnya, peran Masyumi di masa lalu, atau peran Kiai dalam PKB dan legitimasi ulama dalam PKS). Di mana partai-partai tersebut melihat tokoh agama sebagai mediator utama antara partai dan massa, PSI menggunakan media sosial, branding modern, dan isu anti-korupsi sebagai mediator utama, menjadikan peran tokoh agama sebagai perifer (di pinggiran), bukan pusat legitimasi. Ini menandakan bahwa PSI sedang merintis sebuah model politik post-identitas keagamaan di salah satu ibu kota paling politis di Asia Tenggara.

Implikasi teoritis dari jurnal ini adalah bahwa partai politik di Indonesia, khususnya yang berbasis di perkotaan dan menargetkan pemilih muda, kini memiliki jalur alternatif untuk mencapai elektabilitas yang tidak mengharuskan mereka untuk tunduk pada struktur otoritas keagamaan tradisional. PSI membuktikan bahwa daya tarik ideologis modern (anti-korupsi, pluralisme non-sektarian) dapat menjadi sumber daya politik yang setara atau bahkan lebih efektif daripada modal sosial keagamaan yang mapan.

Hasil wawancara dengan Emka Farah Mumtaz²⁹ secara eksplisit mendukung arah jurnal ini yang menyatakan bahwa dukungan tokoh agama tidak sentral dalam membentuk basis elektoral PSI.

- a. Dukungan Personal dan Edukatif: Jurnal ini menyatakan dukungan yang ada bersifat insidental dan personal, bukan *endorsement* kelembagaan yang terstruktur. Wawancara memperjelas hal ini, mendeskripsikan hubungan dengan PSI sebagai "romantis," edukatif, dan sosial, yang terwujud dalam dialog lintas iman atau kegiatan sosial, bukan sebagai mobilisasi massa elektoral.
- b. Dampak Minimal: Emka Farah Mumtaz menyatakan bahwa dukungan pemuka agama bukan penentu utama bagi penerimaan PSI di masyarakat dan hanya berdampak minimal jika tokoh tersebut tidak memiliki basis massa yang besar. Hal ini menguatkan argumen jurnal ini bahwa tokoh agama tidak dilihat sebagai agen mobilisasi (pemegang kunci surga) tetapi sebagai salah satu figur publik di antara banyak lainnya.

PSI merintis jalur elektabilitas tanpa legitimasi agama, didorong oleh identitas modern/sekuler. Wawancara ini memberikan konteks mengapa mobilisasi berbasis agama sulit dilakukan oleh PSI:³⁰

- a. Ketiadaan Resonansi Emosional/Identitas: Keberhasilan mobilisasi oleh tokoh agama (seperti dalam Pilkada DKI 2017 yang menguntungkan

²⁹ Emka Farah Mumtaz, Wawancara Oleh Penulis, Jakarta, 13 Februari 2025.

³⁰ Emka Farah Mumtaz, Wawancara Oleh Penulis, Jakarta, 13 Februari 2025.

Anies Baswedan) bergantung pada narasi identitas yang kuat dan resonansi emosional (misalnya, isu “penistaan agama”). PSI, dengan branding pluralisme modernnya, kesulitan membangun narasi serupa. Ini membuktikan bahwa mekanisme mobilisasi tradisional berbasis agama tidak kompatibel dengan identitas politik yang dibawa oleh PSI.

- b. Fokus pada Kinerja Nyata: Sejalan dengan faktor dominan non-religius (kinerja dan kebijakan) yang diungkap jurnal, wawancara menekankan bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja nyata, bukan sekadar simbolisme keagamaan.

Wawancara ini menambahkan dimensi risiko yang harus dihadapi PSI dalam model politik post-identitas keagamaan ini:³¹

- a. Risiko Politik Transaksional: Jika dukungan ulama dinilai hanya sebagai “pencitraan sesaat,” masyarakat akan menilai ini sebagai politik transaksional. PSI harus membuktikan konsistensi dan komitmen pada isu-isu yang diperjuangkan ulama (seperti pendidikan Islam atau keadilan ekonomi syariah) agar tidak dianggap sekadar memanfaatkan tokoh agama.
- b. Risiko *Backlash* (Dampak Negatif): Dukungan pemuka agama bisa berbalik merusak elektabilitas (*backlash*) jika tokoh yang merapat ke PSI ternyata memiliki rekam jejak yang kontroversial (misalnya, pernah mendukung isu sensitif seperti LGBT). Risiko ini menegaskan adanya *cleavage* ideologis (tradisionalis vs. modernis) yang diidentifikasi oleh jurnal ini.
- c. Ketidakmampuan Menutupi Kelemahan: Dukungan ulama tidak bisa menutupi kelemahan internal partai. Jika PSI dinilai tidak berpengalaman atau kebijakannya ambigu, dukungan tokoh agama hanya menjadi gimmick.

Wawancara ini menawarkan peluang bagi PSI untuk meningkatkan penerimaannya tanpa mengorbankan identitas modernnya, yang sejalan dengan pergeseran *cleavage* ke basis isu:³²

- a. Merangkul Ulama Moderat: PSI berpeluang diterima jika mereka dapat merangkul ulama moderat (seperti Quraish Shihab atau Haedar Nashir) dan fokus pada isu universal seperti anti-korupsi dan keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan PSI memanfaatkan modal sosial ulama (yang relevan dengan isu moral/publik) tanpa harus terlibat dalam politik identitas keagamaan yang kaku.
- b. Menjauhi Isu Sensitif: Tantangannya, PSI harus menjauhkan diri dari isu sensitif (seperti LGBT) yang secara langsung bertentangan dengan nilai

³¹ Emka Farah Mumtaz, Wawancara Oleh Penulis, Jakarta, 13 Februari 2025.

³² Emka Farah Mumtaz, Wawancara Oleh Penulis, Jakarta, 13 Februari 2025.

mayoritas Muslim. Ini adalah navigasi politik yang harus dilakukan PSI di tengah cleavage modernis/sekuler dan tradisional/keagamaan.

Dalam mengevaluasi dan menafsirkan hasil, perlu diakui adanya keterbatasan dalam penelitian ini:

- a. Generalisasi: Fokus eksklusif pada DKI Jakarta membatasi generalisasi jurnal ini ke daerah lain di Indonesia, di mana struktur sosial dan peran tokoh agama mungkin jauh lebih kaku dan sentral.
- b. Bias Pengukuran: Interpretasi terhadap peran marginal mungkin dipengaruhi oleh definisi operasional 'peran' yang terlalu berorientasi pada mobilisasi massa. Meskipun demikian, data empiris menunjukkan bahwa upaya PSI untuk menggandeng tokoh agama tidak menghasilkan efek elektoral yang proporsional dengan upaya yang dikeluarkan.
- c. Penjelasan alternatif yang mungkin adalah bahwa peran tokoh agama sebenarnya tidak marginal, melainkan terselubung atau tersembunyi (misalnya, dukungan diam-diam dari tokoh tertentu yang tidak dipublikasikan). Namun, jika dukungan tersebut tidak memengaruhi hasil elektoral secara kasat mata, dampaknya tetap dianggap marginal dari perspektif analisis politik elektoral.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan utama untuk menguji hipotesis mengenai sentralitas peran tokoh agama dalam menopang dan meningkatkan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Provinsi DKI Jakarta, suatu wilayah yang memiliki sejarah polarisasi politik identitas yang kuat.

Hasil analisis kualitatif mendalam secara tegas menunjukkan bahwa peran dukungan dan legitimasi dari tokoh agama adalah marginal dan tidak esensial dalam pembentukan basis elektoral PSI. Dengan demikian, hipotesis yang menekankan pentingnya legitimasi agama dalam kasus PSI tereliminasi. Elektabilitas PSI justru didorong oleh serangkaian faktor non-primordial yang berpusat pada: daya tarik terhadap pemilih muda perkotaan (Milennial dan Gen Z), komitmen yang diartikulasikan pada isu kebijakan (kinerja dan anti-korupsi), serta keberhasilan membangun identitas politik sebagai oposisi modern/sekuler terhadap partai-partai mapan berbasis agama.

Jurnal ini secara signifikan memajukan bidang ilmu politik Indonesia dengan memperkenalkan konsep “Elektabilitas Tanpa Legitimasi Agama.” Ini menantang klaim universal mengenai kebutuhan mutlak akan patronase keagamaan dalam politik Indonesia, terutama di wilayah metropolitan. Penelitian ini memverifikasi bahwa *political cleavage* telah bergeser: politik elektoral tidak lagi didominasi oleh sumbu primordial-keagamaan, melainkan semakin berorientasi pada sumbu generasi dan ideologi modernis-vs-tradisionalis.

Implikasi ilmiah dari karya ini adalah bahwa partai politik kini memiliki jalur alternatif yang terbukti efektif untuk membangun modal elektoral yang independen dari struktur otoritas keagamaan tradisional. Penerapan praktisnya adalah partai baru dapat bersaing secara kredibel dengan berfokus pada substansi kinerja, transparansi, dan branding otentik yang sesuai dengan nilai-nilai kosmopolitan pemilih perkotaan.

Meskipun penelitian ini mengakui keterbatasannya pada konteks DKI Jakarta, yang memiliki karakteristik demografi dan media yang unik, temuan ini berfungsi sebagai indikator awal adanya politik post-tradisional di ibu kota, yang berpotensi menjadi model bagi partai-partai baru lainnya di masa depan.

Untuk memperluas validitas eksternal penulisan ini, penelitian di masa depan disarankan untuk:

1. Melakukan studi komparatif kuantitatif mengenai “peran tokoh agama” antara PSI dan partai berbasis agama lainnya (misalnya PKS atau PKB) di wilayah yang berbeda (*e.g.*, Jawa Barat atau Banten) untuk mengukur dampak mobilisasi yang lebih eksplisit.
2. Menganalisis secara mendalam peran *influencer* media sosial non-agama, jurnalisme warga, dan *micro-targeting* politik sebagai pengganti peran mobilisasi tokoh agama tradisional.
3. Menguji hipotesis pergeseran *political cleavage* ini melalui survei *longitudinal* untuk memetakan perubahan preferensi pemilih Gen Z seiring waktu.

Integrasi penulisan jurnal ini dan hasil wawancara memperkuat tesis “Elektabilitas Non-Legitimasi” PSI. Peran tokoh agama bagi PSI di DKI Jakarta bukan dihapuskan, melainkan didefinisi dari agen mobilisasi massal menjadi mitra kolaborasi sosial-edukatif yang berperan marginal dalam mobilisasi elektoral. Keberhasilan PSI lebih ditentukan oleh konsistensi kinerja non-religius dan kemampuan bernegosiasi dengan *cleavage* ideologis daripada oleh dukungan simbolis dari tokoh agama.

Referensi

- Ambardi, Kuskridho. *Menguak Partai Parlemen: Politik Kepartaian di Indonesia*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).
- Aspinall, Edward. *The New Politics of Anti-Corruption in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2019.
- Bayat, Asef. “What is Post-Islamism?”. *Third World Quarterly*. Vol. 26, No. 6 (2005).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- F. Mumtaz, Emka. Wawancara Oleh Penulis. Jakarta, 13 Februari 2025.

- Fadillah, A. B., & Aditama, "A. The Politics of Identity and Populism in Jakarta's Gubernatorial Election: A Study of Anies Baswedan's Victory". *Asian Politics & Policy*, 2021.
- Hassan, Fuad & Tambunan, Rina. "Rethinking Political Resources: Performance Legitimacy and Civic Identity in Indonesian Urban Politics". *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2023).
- Hefner, Robert W. *Civic Pluralism and the Politics of Religion in Indonesia*. Oxford University Press, 2011.
- https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/dkijakarta/data_kepkpud/2024kpt33.pdf, diakses pada Selasa 27 Mei 2025 pukul 10.30 PM.
- Jauharin, "Partai Politik Islam dan Strategi Elektoral di Era Reformasi," *Jurnal Studi Keagamaan dan Politik*, Vol. 4, No. 4 (2022)
- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. *Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif DKI Jakarta*, 2019.
- Liddle, R. William. *Demokrasi dan Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018.
- Lynch, Anthony C. "God, Youth, and Democracy: The PSI and the Challenge to Indonesia's Religious Establishment". *South East Asia Research*, 2020.
- Mietzner, Marcus. *Democracy's Discontent: Indonesia's Decade of Contested Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 2020.
- Mietzner, Marcus. "The Rise of the Millennials: Generational Change and Its Impact on Indonesian Politics". *Journal of Contemporary Asia*, 2018.
- Mujani, Saiful. & Liddle, R. William. "The New Politics of Islam in Indonesia: A Contested Space". *Asian Survey*. Vol. 59, No. 4 (2019).
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nugraha, "Agama dan Mobilisasi Massa di Pilpres 2019," *Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 2 (2019).
- Nugroho, Yanuar. *A New Generation of Voters: Digital Natives and Indonesian Politics*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Laporan Survei Nasional/DKI Jakarta tentang Preferensi Pemilih Muda. (2020/2021)
- Suprayogo, Imam. & Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Supriyadi, "Peran Tokoh Agama dalam Politik Elektoral Lokal," *Jurnal Kajian Politik*, Vol. 12, No. 3 (2008)
- Ufen, Andreas. *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Patronage and Pragmatism*. London: Routledge, 2015.
- Uswah, "Islam, Negara, dan Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1 (2007).

Utari, “Identitas Kolektif dan Kontestasi Elektoral Jakarta 2017”. *Jurnal Sosiologi Politik*, Vol. 8, No. 1 (2020).

Klinken, Gerry Van. *The State and the Non-State in Indonesia: An Examination of Political Identity and Local Power*. ANU Press, 2014.

W. Hefner, Robert. *Politics of Identity: Islam, Liberalism, and the Limits of Pluralism in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2019.